



# Lurah dan Camat di Kota Yogyakarta

## Deklarasi Antinarkoba

■ Yulianingsih

**K**omitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih bukan hanya di bidang antikorupsi semata, tetapi juga bidang lainnya termasuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (narkoba).

Terkait hal tersebut, Pemkot Yogyakarta menggandeng Polda DI Yogyakarta untuk membina para lurah dan camat di wilayah agar memerangi penggunaan obat-obatan terlarang tersebut.

Sedikitnya 14 camat dan 45 lurah se Kota Yogyakarta bersama pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendeklarasikan antinarkoba di Balai Kota setempat, Selasa (29/10).

Deklarasi tersebut disaksikan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Direktur Direktorat Reserse dan Narkoba Polda DIY, Kombes Pol Andi Fairan.

Deklarasi itu berisi lima poin penting, yaitu mewujudkan Indonesia khususnya Kota Yogyakarta bebas narkoba, mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penya-

lahgunaan narkoba, menjadikan kecamatan dan kelurahan sebagai pelopor bersih antinarkoba, berperan aktif membantu Polri dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta tidak sekali-kali terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama Pemkot Yogyakarta dan wilayah untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba.

"Kalau ada camat dan lurah terbukti menggunakan narkoba, saya akan melakukan tindakan tegas dengan pemberhentian tidak hormat. Dan Saya sendiri berjanji tidak akan pernah bersama keluarga saya menggunakan narkoba dan saya siap diberhentikan jika terbukti menggunakan narkoba," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta, kata Haryadi, akan melakukan pemantauan intensif terhadap aparaturnya terkait penyalahgunaan narkoba ini. Pihaknya bukan hanya akan mengimbau semata, tetapi juga melakukan tes urin secara berkala terhadap para camat, lurah, dan pimpinan SKPD yang dicurigai menggunakan narkoba.

"Kita akan terus melakukan pe-

ngawasan. Monitoring ke wilayah bersama aparat Polri," katanya.

Pemkot sendiri, kata dia, secara berkala telah melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersama Polda DIY. Bukan hanya kepada lurah dan camat, tetapi seluruh elemen masyarakat di Yogyakarta.

Sementara Kombes Pol Andi Fairan dalam kesempatan itu mengatakan pemerintah daerah wajib mendirikan tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Para pengguna narkoba sendiri, menurut dia, wajib lapor ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk diberikan pertolongan.

"Bagi pengguna yang melaporkan diri, maka dia akan terbebas dari hukum, karena akan dibantu untuk keluar dari barang haram itu," ujarnya.

Di Kota Yogyakarta, kata dia, ada dua tempat yang ditunjuk pemkot sebagai tempat wajib lapor dan penanganan bagi pengguna narkoba. Kedua tempat ini adalah Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Gedongtengen.

Sedangkan secara keseluruhan di DIY ada beberapa tempat lainnya,



yaitu RS Sardjito, RS Grasia Sleman, Puskesmas Banguntapan Bantul, RSPP Purwomartani Sleman, Panti Rehab Kunci Sleman, dan Griya Siloam Sleman.

Berdasarkan peta penyalahgunaan narkoba sendiri, kata dia, di Kota Yogyakarta ada lima kecamatan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Lima kecamatan tersebut adalah Umbulharjo, Mergangsan, Gondokusuman, Tegalrejo, dan Mantriweron.

"Ini kita lihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang kita tangani pada 2012 lalu," katanya.

Berdasarkan data selama 2012, di Kecamatan Umbulharjo ditemukan 18 kasus, Kecamatan Mergangsan 9 kasus, Gondokusuman 8 kasus, Tegalrejo 7 kasus dan Mantriweron 7 kasus.

Polda DIY, kata dia, berharap melalui kerja sama dengan wilayah secara langsung bisa menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Yogyakarta. Pasalnya, melalui kegiatan tersebut, para camat dan lurah digugah untuk lebih aktif dalam ikut memerangi dan mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing.

"Ini langkah bagus yang patut diapresiasi," tegasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005